



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI NURDJANAH
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 806760

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.708.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.508.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.508.000.000
3. Tanah Seluas 282 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 158.000.000
4. Tanah Seluas 412 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 508.000.000
5. Tanah Seluas 262 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 142.000.000
6. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 168.000.000
7. Tanah Seluas 1360 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 708.000.000
8. Tanah Seluas 1.077 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 1.008.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **130.000.000**

1. MOBIL, KIJANG INOVA 2.4 V AT MOBIL PENUMPANG Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.913.933.059
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.751.933.059
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.751.933.059

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.